

EVALUASI PELATIHAN RENCANA PEMULIHAN USAHA DALAM PROGRAM MUHAMMADIYAH DISASTER MANAGEMEN CENTER

Fery¹, Muhamad Dasril²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palu
email: feryel089@gmail.com

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palu
Korespondensi email: riel.kodi@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to determine aspects of satisfaction and increase knowledge of participants in participating in the Business Recovery Plan Training (RPU) in the Micro and Tsunami Recovery Program for the Disasters of the Earthquake and Tsunami conducted by the Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) in collaboration with Solidar Suisse. This type of research is a qualitative descriptive, data collection methods of observation studies, interviews, documentation, and data analysis techniques through interpretive analysis approach techniques. The results of the study showed that most of the Sirenja people who participated in the Business Recovery Plan Training (RPU) were satisfied and had understood about the preparation of the RPU on good performance. But it is still low in the practice of preparing RPU.

Keyword: recovery; plans; micro business.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan tingkat pengetahuan dari peserta dalam mengikuti Pelatihan Rencana Pemulihan Usaha (RPU) pada Program Pemulihan Usaha Mikro pascabencana gempa bumi dan tsunami yang dilakukan oleh Muhammadiyah Disaster Managemen Center (MDMC) bekerjasama dengan Solidar Suisse. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, teknik analisis data melalui teknik pendekatan analisis interpretasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Sirenja yang mengikuti Pelatihan Rencana Pemulihan Usaha (RPU) puas dan telah memahami tentang Penyusunan RPU pada performa baik. Namun masih rendah dalam praktek penyusunan RPU.

Kata Kunci: pemulihan; rencana; usaha mikro.

PENDAHULUAN

Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, Tsunami, angin putting beliung dan banjir. Hal ini seperti ungkapan Kurniasari (2017) yang menyatakan Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena berada pada lempengan Indo-Australia dan Eurasia. Kondisi ini yang mengakibatkan rentannya Indonesia pada berbagai jenis bencana alam seperti gunung meletus dan gempa bumi bahkan diikuti oleh tsunami.

Menanggapi hal tersebut di atas Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan bahwa Pusat Penanggulangan Bencana yang telah dibentuk pada tahun 2007, pada periode 2010-2015 diubah menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana, sebagai institusi yang langsung berada di bawah koordinasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebutannya adalah Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Sehingga Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) merupakan lembaga Muhammadiyah yang bertugas untuk mengkoordinasikan mobilisasi sumberdaya dalam Tanggap Darurat Bencana, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana dan Rehabilitasi Pasca Bencana.

Bencana gempa bumi dengan skala 7,4 SR yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 yang disusul dengan terjadinya Tsunami dan liquifaksi, di Sulawesi Tengah, tidak saja menimbulkan kerusakan dan kerugian dibidang infrastruktur. Namun juga melumpuhkan sektor ekonomi dan mata pencaharian masyarakat. Dampak besar yang ditimbulkan akibat bencana tersebut, setidaknya mengakibatkan 2.081 jiwa meninggal dunia, 12.568 jiwa luka-luka, 1.309 jiwa hilang, 214.925 jiwa mengungsi. Bahkan bencana tersebut juga mengakibatkan kerusakan bangunan. Tercatat dari data BNPB (2019) setidaknya ada 68.451 unit rumah, 327 unit rumah ibadah, 45 unit fasilitas kesehatan, dan 265 unit sekolah yang mengalami kerusakan.

Bencana besar tersebut mendorong Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) bekerja sama dengan Solidar Suisse, sebuah organisasi swadaya masyarakat Swiss (NGO) yang mempunyai tujuan untuk memberikan pekerjaan yang layak, berpartisipasi dalam demokrasi dan peningkatan kondisi kehidupan di negara-negara yang miskin, termasuk bagi Negara yang mengalami bencana, dengan memberikan bantuan kemanusiaan secara cepat dan tepat terhadap masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

Salah satu yang jadi sasaran adalah Kecamatan Sirenja. Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala merupakan salah satu dari sejumlah Kecamatan di Sulawesi Tengah khususnya di tiga Kabupaten/Kota (Palu, Sigi, dan Donggala), yang terdampak besar terhadap bencana gempa bumi kemudian dengan susul terjadinya Tsunami. Sebanyak 21.381 warga Sirenja, yang terdiri dari 10.829 laki laki dan 10.552 perempuan (Kecamatan Sirenja dalam angka: 2017), butuh bantuan untuk memulihkan ekonomi keluarga, maka itulah Program Pemulihan Usaha Mikro ini menjadi salah satu strategi untuk dapat menyelesaikan permasalahan perekonomian masyarakat di Kecamatan Sirenja pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami. Strategi ini dinilai mampu untuk memberikan sinergi dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Tentunya harus dijalankan secara adil, merata, dan tepat sasaran.

Dalam program pemulihan usaha mikro ini, selain memberikan bantuan tunai bersyarat untuk membeli aset yang diperlukan dalam melanjutkan dan meningkatkan pekerjaan asli kepada masyarakat sebagai penerima manfaat, juga salah satu strategi yang dibuat adalah pengusaha mikro mengikuti pelatihan keterampilan teknis yakni pelatihan Rencana Pemulihan Usaha (RPU) dengan harapan pengusaha mikro dapat mengembangkan rencana bisnis dan dapat menerjemahkan isi pelatihan ke dalam realitas keseharian dalam berbisnis.

Hal yang mendasar yang menjadi hambatan pada pelaksanaan pelatihan ini adalah, terbatasnya anggaran tersedia sehingga mengakibatkan tidak seimbangannya antara jumlah peserta dibandingkan dengan keseluruhan target sasaran, ini dikarenakan peserta berasal dari berbagai desa di lingkup wilayah Kecamatan Sirenja selain itu keragaman asal desa peserta pelatihan menyebabkan banyak kendala dalam penyelenggaraan pelatihan, seperti penetapan peserta pelatihan termasuk dalam hal pelaksanaan waktu pelatihan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Evaluasi

Dewi (2016) memberikan pemahaman tentang tujuan evaluasi yakni dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu program kegiatan atau proyek. Informasi ini biasanya berguna untuk pengambilan keputusan, seperti penyempurnaan lebih lanjut dari suatu kegiatan, atau penghentian suatu kegiatan proyek, atau penyebarluasan suatu gagasan yang mendasari suatu kegiatan yang sedang diuji cobakan. Sedangkan Dasril (2018) berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya, kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya. Dari pendapat tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Selanjutnya menurut Dewi (2016) terdapat beberapa unsur kegiatan yang biasa dilakukan dalam proses evaluasi:

- a. Mengumpulkan keterangan mengenai kemungkinan-kemungkinan keputusan yang hendak diambil terhadap permasalahan.
- b. Berdasar hasil pengumpulan keterangan, kemudian mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu kegiatan.
- c. Hasil pengumpulan data dan informasi, kemudian kegiatan pengolahan data untuk disajikan kepada pengambil keputusan.
- d. Penetapan keputusan dengan memilih salah satu alternatif tindakan yang terbaik.

Fauzi (2011) fungsi utama evaluasi adalah memberikan data informasi yang benar mengenai pelaksanaan suatu pelatihan sehingga penyelenggaraan pelatihan tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat apakah pelatihan tersebut akan diteruskan, ditunda atau sama sekali tidak dilaksanakan lagi. Oleh karena itu, evaluasi pelatihan berfungsi sebagai suatu usaha untuk:

- a. Menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan pelatihan. Dalam hal ini juga dapat untuk mengetahui bahwa pelaksanaan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku peserta adalah suatu investasi yang sesuai dengan besaran biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelatihan.
- b. Menemukan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pelatihan.
- c. Menemukan penyimpangan atau kekeliruan pelaksanaan pelatihan.
- d. Memperoleh bahan untuk penyusunan saran perbaikan, perubahan, penghentian atau perluasan pelatihan. Keberlangsungan kegiatan pelatihan dilihat berdasarkan manfaat dari pelaksanaan pelatihan tersebut, jika memang tidak ada nilai atau manfaat yang dihasilkan maka pelatihan bisa diberhentikan.

Menurut Meilya & Syamsi (2015) ada empat level yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi sebuah program, yaitu:

- a. *Reaction Level*

Mengevaluasi terhadap reaksi peserta pelatihan berarti mengukur kepuasan peserta (*customer satisfaction*). Kepuasan peserta dikaji dari empat aspek yaitu: (a) kepuasan peserta terhadap materi pelatihan; (b) kepuasan peserta terhadap fasilitator pelatihan; (c) kepuasan peserta terhadap metode pelatihan; dan (d) kepuasan peserta terhadap fasilitas/sarana prasarana pelatihan yang disediakan.

- b. *Learning Level*

Menurut Kirkpatrick, ada tiga hal yang dapat pelatih ajarkan dalam program pelatihan, yaitu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Peserta pelatihan

dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan, maupun peningkatan keterampilan.

c. *Behavior Level*

Penilaian tingkah laku, difokuskan pada perubahan tingkah laku peserta setelah kembali di tempat kerja. Apakah perubahan pengetahuan yang telah terjadi setelah mengikuti pelatihan juga akan diimplementasikan melalui tindakan atau perilaku nyata setelah peserta kembali ke tempat kerja sehingga penilaian tingkah laku ini lebih bersifat eksternal.

d. *Result Level*

Evaluasi hasil dalam level keempat difokuskan pada hasil akhir (*final result*) yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program pelatihan. Dengan kata lain adalah evaluasi terhadap *impact* program.

2. Pelatihan

Pelatihan pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan kualitas dan produktifitas masyarakat yang menjadi peserta pelatihan, oleh karena itu guna menunjang keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan tersebut memerlukan dukungan dan peran aktif dari masyarakat yang berkepentingan atas pelatihan (Rizal et al., 2019). Selama ini wujud dari dilaksanakannya berbagai pelatihan sebagai jawaban atas kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga dengan adanya pelatihan akan memberikan manfaat pada peningkatan pengembangan sumber daya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Widiasih & Suminar (2015) mengungkapkan bahwa berbagai pelatihan memang lebih banyak dilaksanakan dalam masyarakat atau dalam dunia kerja untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan fungsional. Kegiatan-kegiatan pelatihan ini sangat populer dan mudah dilakukan karena menggunakan prinsip-prinsip dan metode-metode pendidikan dan pembelajaran pada pendidikan luar sekolah. Meskipun demikian, tak jarang pula pelaksanaan pelatihan ini dipadukan atau saling melengkapi dengan pendidikan formal. Pelatihan adalah prosedur formal yang difasilitasi dengan pembelajaran guna terciptanya perubahan tingkah laku peserta pelatihan. Angisna (2018) menyatakan bahwa pencapaian keberhasilan suatu program salah satunya dapat dipengaruhi oleh keahlian atau kemampuan dari pelaksana program tersebut. Pelatihan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian dari pelaksana.

Karwati (2015) menyatakan bahwa kesuksesan atau keefektifan program pelatihan dari langkah pertama sampai akhir sangat ditentukan oleh akurasi *need assesmen* sehingga dapat mempengaruhi perencanaan khususnya dalam penentuan akan mempengaruhi langkah berikutnya yaitu perumusan tujuan pelatihan, menyusun desain pelatihan, pelaksanaan dan evaluasi dan sebaliknya. Selain itu Sutarto dkk (2018) juga menyatakan bahwa standar kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta pelatihan dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kecakapan hidup berbasis keunggulan lokal lebih difokuskan pada empat kompetensi dasar yaitu:

- a. Pengetahuan akademik meliputi kemampuan peserta pelatihan dalam menganalisis kondisi pasar, menganalisis kondisi usaha, mampu mengambil keputusan dan mengambil resiko, mampu memanfaatkan peluang, dan menguasai inovasi usaha.
- b. Sikap, personal dan sosial meliputi sopan santun, jujur, disiplin, tekun, semangat kerja, tahu diri, ulet dan kesederhanaan sebagai wirausaha, membangun jaringan, tenggang rasa, serta kerjasama dalam berusaha.

- c. Keterampilan kecakapan hidup yaitu memiliki keterampilan produksi dan jasa sesuai kebutuhan pasar.
- d. Manajerial usaha kecil meliputi mendalami proses usaha kecil, menguasai pemasaran, menguasai administrasi usaha kecil dan menguasai jaringan usaha (*supplier-buyer*).

Suwanto & Priansa (2016) mengungkapkan bahwa strategi yang dapat ditempuh dalam pelatihan SDM dimulai dari pengkajian kebutuhan (*need assesment*) untuk suatu program, persiapan dan pelaksanaan pelatihan, evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi pelatihan.

3. Usaha Mikro

Dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan milik orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak/cabang dari usaha menengah/besar lainnya. Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut UU ini, kriteria dari suatu usaha mikro kecil menengah itu adalah memiliki kekayaan bersih diantara Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000. Namun dalam program ini, usaha mikro yang dibantu oleh MDMC dan Solidar Suisse adalah Skala usaha mikro yang total asetnya maksimal Rp. 10.000.000 dan penghasilan per bulan maksimal Rp.2.000.000,00. sebagaimana tertuang dalam modul gambaran umum program usaha mikro kerjasama MDMC dan Solidar Suisse (2019).

Selanjutnya ketika berbicara tentang pemulihan UMKM maka berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia *online* bahwa kata pulih artinya kembali menjadi baik atau sehat seperti semula. Bisa juga diartikan baik kembali. Sementara pemulihan diartikan sebagai proses atau cara dalam mengembalikan atau pemulangan hak, harta benda dan lain sebagainya. Proses pemulihan pada sektor ekonomi di kawasan pasca bencana harus disesuaikan dengan Peraturan BNPB Nomor 11 Tahun 2008. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang pedoman rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Amni Zarkasyi Rahman, 2017). Pada ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan pasca bencana khususnya bidang ekonomi mencakup:

- a. Yang dimaksud dengan pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana.

- b. Kegiatan dan lembaga ekonomi adalah kegiatan dan/atau hubungan-hubungan kemasyarakatan di bidang ekonomi yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang ekonomi.
- c. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana seperti sebelum terjadi bencana

Secara defenisi operasional bahwa pemulihan usaha mikro adalah cara MDMC dan Solidar Suisse dalam mengembalikan usaha ekonomi produktif masyarakat seperti semula atau lebih baik lagi dibandingkan sebelum bencana gempa bumi dan Tsunami terjadi di Kecamatan Sirenja.

METODE

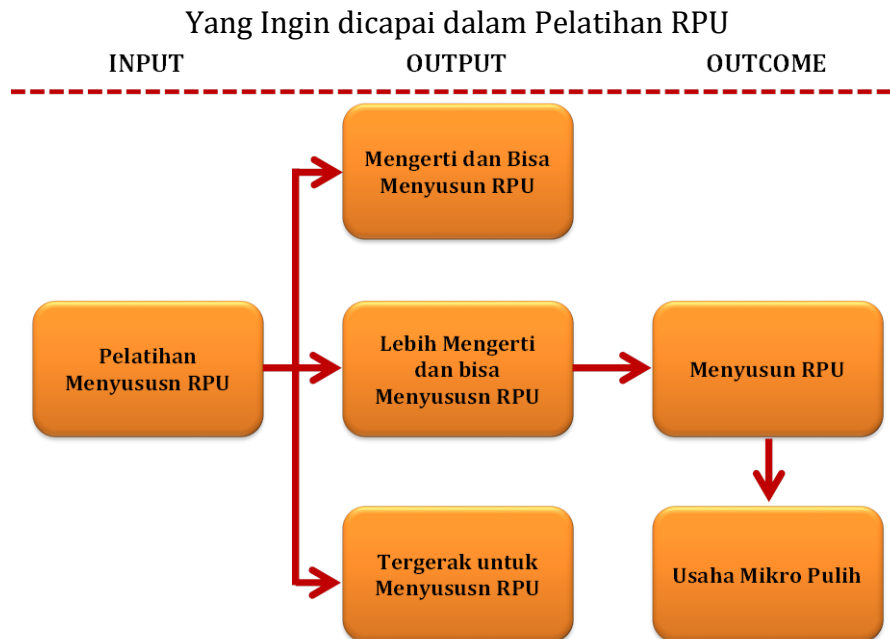
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengukur tingkat kepuasan dan tingkat perubahan pengetahuan peserta (Moleong, 2017). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dalam periode Agustus 2019 hingga Januari 2020.

Sasaran penelitian adalah peserta pelatihan Rencana Pemulihan Usaha (RPU) dari desa Tondo, Lende, Sipi, Dampal, Balentuma, Lompio, Tompe, Tanjung Padang, Jono Oge, dan Lende Tovea di Kecamatan Sirenja. Namun Dalam penelitian ini tidak digunakan populasi dan sampel, karena ini adalah penelitian kualitatif, sehingga hanya menggunakan informan. Penentuan informan dilakukan sesuai dengan perolehan jangkauan informasi dengan sistem *Purposive*, yaitu dengan menentukan langsung informan yang di wawancara untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Analisis data melalui teknik pendekatan analisis interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan yang dilaksanakan oleh MDMC dan Solidar Suisse merupakan wujud pemberdayaan sebagai motivasi atau dorongan bagi masyarakat Kecamatan Sirenja untuk mengasah kemampuan yang dimiliki serta dapat menjadikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha sendiri. Guna mengetahui hasil yang diperoleh dari pelatihan yang diberikan maka perlu dilakukan evaluasi, tentunya perlu diketahui sejauhmana kepuasan serta pemahaman peserta pelatihan tersebut terhadap materi yang diberikan selama pelatihan. Hal ini penting mengingat bahwa belum tentu sebuah pelatihan yang diberikan selalu memberikan hasil yang efektif sesuai dengan tujuan pelatihan yang ingin dicapai.

Dalam pelatihan RPU ini, tentu ada tingkatan perubahan yang ingin dicapai, yaitu masyarakat harus bisa menyusun Rencana Pemulihan Usaha (RPU) dengan baik, sesuai yang diharapkan oleh pelaksana program yakni MDMC dan Solidar Suisse.



Gambar 1. Pencapaian dari pelatihan RPU
(Sumber MDMC, 2019)

Guna mendukung efektivitas bantuan modal yang disalurkan oleh MDMC dan Solidar Suisse, maka masyarakat sebagai penerima manfaat perlu dibekali dengan pengetahuan tentang manajemen Usaha Mikro tingkat dasar pada lingkup masing-masing usaha yang dijalankan. Maka salah satu pelatihan yang diselenggarakan adalah Pelatihan Rencana Pemulihan Usaha (RPU) yang terdiri dari 11 topik yakni:

1. Pengertian umum Rencana Pemulihan Usaha.
2. Identifikasi Pembeli/Pelanggan.
3. Keunggulan produk/jasa.
4. Saluran Distribusi.
5. Cara Membangun Hubungan dengan Pembeli/Pelanggan.
6. Taksiran pendapatan tambahan.
7. Identifikasi aktivitas utama.
8. Inventarisasi dan pengelolaan sumberdaya utama.
9. Identifikasi mitra.
10. Taksiran semua biaya yang muncul, dan
11. Praktek menyusun Rencana Pemulihan Usaha (RPU)

Masyarakat Kecamatan Sirenja sebagai penerima manfaat, secara umum telah mengikuti kegiatan pelatihan RPU dengan baik. Namun dalam menerima materi yang diberikan tentu hasilnya bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah masyarakat penerima manfaat, ditemukan bahwa sebelum menerima materi pelatihan RPU, masyarakat sebagian besar tidak memiliki pengetahuan tentang rencana usaha secara keseluruhan, bahkan sangat awam. Namun demikian, tetap ada beberapa warga yang telah mengetahui, meskipun belum sepenuhnya dipraktikkan. Sementara Setelah mengikuti pelatihan, ditemukan bahwa masyarakat secara keseluruhan mengatakan bisa mengetahui dan siap mempraktekkan di lapangan saat menjalankan usaha, baik usaha home industri, perdagangan, maupun jasa. Hampir semua informan mengaku pelatihan RPU sangat penting bagi mereka dalam menambah pengetahuan tentang rencana usaha. Dan pelatihan telah berhasil menciptakan kepuasan masyarakat karena materi yang disajikan mudah dipahami.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan mengacu pada 11 topik, ditemukan bahwa tingkat pengetahuan tertinggi ada pada topik 1 (Pengertian umum Rencana Pemulihan Usaha) dan topik 5 (Cara Membangun Hubungan dengan Pembeli/Pelanggan). Sementara tingkat pengetahuan terendah adalah pada topik 11 (Praktik Menyusun RPU). Sementara topik lainnya, rata-rata dipahami dengan baik. Namun secara umum belum dijalankan saat menjalankan usaha masing-masing. Sementara tingkat kepuasan masyarakat dalam mengikuti pelatihan RPU cukup puas sehingga secara umum performa tingkat kepuasan berada pada kategori sangat baik. Artinya materi pelatihan yang diberikan fasilitator telah dipahami dengan baik. Hanya saja, belum dijalankan karena menjalankan usaha mikro dengan perencanaan tertulis, selama ini belum pernah dilakukan oleh masyarakat.

Pelatihan Rencana Pemulihan Usaha (RPU) Mikro yang diselenggarakan oleh MDMC dan Solidar Suisse secara keseluruhan telah nyata mengubah performa pengetahuan masyarakat yang berpartisipasi dalam program tersebut. Bahkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan tentang RPU tergolong tinggi dan merata untuk setiap topik. Sehingga peserta memahami materi pelatihan yang disampaikan dalam meningkatkan kompetensi peserta yaitu pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan RPU cukup efektif dalam memberikan pengetahuan, peningkatan pengetahuan, dan motivasi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha mikro, sehingga dapat memulihkan kembali usaha mereka yang terdampak bencana, walaupun pada tahap dalam menyusun RPU, masyarakat belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini semata karena belum terbiasa dalam membuat perencanaan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan pelatihan RPU telah berjalan baik dan telah mampu menambah pengetahuan masyarakat dalam memulihkan usaha yang terdampak bencana alam. Dari sisi output dimana masyarakat telah mengerti dan bisa menyusun RPU. Bahkan masyarakat tergerak untuk menyusun RPU. Namun dari sisi *outcome*, dalam menyusun RPU, masyarakat belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini semata karena belum terbiasa dalam membuat perencanaan selama ini menjalankan usaha mereka. Untuk itu diperlukan pendampingan dari fasilitator, baik dari NGO seperti MDMC maupun fasilitator yang disediakan pemerintah, sehingga masyarakat terbiasa dalam membuat perencanaan usaha, terutama dalam memulihkan usaha yang terdampak pada bencana alam.

DAFTAR RUJUKAN

- Amni Zarkasyi Rahman. (2017). Kapasitas Daerah Banjarnegara dalam Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 1–8. <https://doi.org/10.14710/jis.16.1.2017.1-8>
- Angisna, T. (2018). Evaluasi Efektivitas Pelatihan Kampung KB di Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. *Jurnal PROMKES*, 6(1), 93–104. <https://doi.org/10.20473/jpk.v6.i1.2018.93-104>
- Dasril, M. (2018). *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro* (Hayat (ed.); 1st ed.). Prenada Media Group.
- Dewi, R. S. (2016). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 1(2), 156–165. <https://doi.org/10.30870/e-plus.v1i2.1161>

- Fauzi, I. K. A. (2011). *Mengelola Pelatihan Partisipatif*. Alfabeta.
- Karwati, L. (2015). Dampak Program Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Terhadap Usaha Home Industry Makanan Ringan Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. *Jurnal Empowerment*, 3(1), 102–125. <https://doi.org/10.22460/empowerment.v4i1p102-125.561>
- Kurniasari, N. (2017). Strategi Penanganan Krisis Kepariwisata dalam Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(2), 177–189. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i2.3007>
- Meilya, I. R., & Syamsi, I. (2015). Evaluasi program pelatihan in-house training pembelajaran paket C di sanggar kegiatan belajar Jawa Tengah. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), 156–174. <https://doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6353>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rizal, M., Mustapita, A. F., & Kartika Sari, A. F. (2019). Pelatihan Untuk Pengajuan Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Sebagai Peningkatan Kinerja UMKM. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(1), 15–22. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v3i1.2569>
- Sutarto, J., Mulyono, S. E., Nurhalim, K., & Pratiwi, H. (2018). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 35(1), 27–40. <https://doi.org/10.15294/jpp.v35i1.15091>
- Suwanto, & Priansa, D. J. (2016). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Alfabeta.
- Widiasih, E., & Suminar, T. (2015). MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PELATIHAN BATIK BREBESAN (Studi di Mitra Batik Desa Bentar Kabupaten Brebes). *Journal of Nonformal Education*, 1(1), 89–95. <https://doi.org/10.24914/pnf.v1i1.3987>